ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 - 2021 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Diajukan Oleh :

Stella Gracia Immaculata

NIM. 07011381823153

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018-2021 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

STELLA GRACIA IMMACULATA
07011381823153

Pembimbing I	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
1. Sofyan Effendi,S.IP., M.Si NIP.197705122003121003		16 Juni 2022
Pembimbing II		
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si NIP.198801272019031005		15 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 - 2020 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI OLEH :

STELLA GRACIA IMMACULATA
07011381823153

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2022

Pembimbing :

1. **Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**
   NIP. 19770512200312003

2. **Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si**
   NIP. 198801272019031005

Penguji :

1. **Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**
   NIP.195811191985031003

2. **Dr. Katriza Imanie, M.Si**
   NIP. 196810221997022001

Mengetahui,

DEKAN FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Stella Gracia Immaculata
NIM	: 07011381823153
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang, 21 Juni 2000
Program Studi / Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik / Keuangan Negara dan Fiskal
Judul Skripsi	: Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam penambahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiaih ini.

Palembang, Juni 2022
Yang membuat pernyataan

Stella Gracia Immaculata
07011381823153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It always seems possible until its done. Great things take time”

Atas Berkat Tuhan yang Maha Esa,

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Kepada :

1. **Papa dan Mama tercinta, atas semua dukungan baik secara moril maupun materil.**
2. **Kedua Saudari Saya**
3. **Dosen dan Pegawai FISIP Unsri**
4. **Rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2018**
5. **Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja tahun 2018-2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep kinerja belanja yang dikemukakan oleh Mahmudi yang terdiri dari 4 aspek analisis yaitu : analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis rasio efisiensi belanja. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada Analisis varians belanja tahun 2018-2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan menunjukkan selisih *underspending*. Analisis pertumbuhan belanja di tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang negatif karena mengalami penurunan akibat pandemi. Aspek keserasian belanja untuk belanja operasi dapat dianalisis tidak serasi karena melampaui batas normal di tahun 2018, 2020,2021. Untuk belanja modal yang mengalami keserasian hanya tahun 2018-2020. Untuk efisiensi dari tahun 2018-2021 totalnya sebesar 92,11 persen. Dari empat aspek yang ada, hanya dua aspek yang memenuhi standar yaitu aspek varians belanja dan rasio efisiensi belanja. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu, aspek pertumbuhan belanja dan aspek keserasian belanja belum terpenuhi.

Kata Kunci : Analisis, belanja, kinerja

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Jantar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005

Palembang, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur budiyanto, S.Sos., M.PA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study entitled "Analysis of Regional Expenditure Performance in the 2018-2021 Budget Realization Report at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province". The type of research in this thesis is descriptive using qualitative research methods. The types of data used are primary data and secondary data, while the data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews and documentation. This study uses the concept of spending performance proposed by Mahmudi which consists of 4 aspects of analysis, namely: analysis of spending variance, analysis of spending growth, analysis of shopping compatibility, and analysis of spending efficiency ratios. Based on the results of the study, it can be seen that the analysis of the 2018-2021 expenditure variance at the South Sumatra Regional Development Planning Agency shows the difference in underspending. Analysis of spending growth in 2020 shows negative growth due to a decline due to the pandemic. The compatibility aspect of spending for operating expenses can be analyzed as inconsistent because it exceeds the normal limit in 2018, 2020, 2021. For capital expenditures that are in compatibility only in 2018-2020. For efficiency from 2018-2021 the total is 92.11 percent. Of the four existing aspects, only two aspects meet the standards, namely the aspect of spending variance and the ratio of spending efficiency. Meanwhile, two other aspects, namely, aspects of spending growth and aspects of shopping compatibility have not been fulfilled.

Keywords : Analysis, Performance, Expenditure

Advisor I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Advisor II

Jabrik Eko Aryadsah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005

Palembang, June 2022
Chairman of the Department of Publik Administration
Faculty Social and Political Science
University of Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur budiyanto, S.Sos., M.PA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **"Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan".** Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penelitian ini disusun atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat berharga kepada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Alfitri,M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya yang telah membantu dan mendukung penyusunan usulan penelitian ini.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI yang telah membantu dan mendukung penyusunan usulan penelitian ini.
3. Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si, selaku Pembimbing I (pertama) yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran penelitian ini..
4. Bapak Januar Eko Aryansah,S.IP., S.H., M.Si, selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membagi ilmunya danmemberikan banyak masukan untuk kelancaran pengerjaan penelitian ini.
5. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat bagi penulis dalam menjalankan proses pembelajaran akademik selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya pengurus dan pegawai yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data daninformasi guna kelancaran penyusunan penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Dengan selesai nya penulis dalam pengerjaan penelitian ini maka diharapkan berguna serta bermanfaat bagi kegiatan akademik maupun instansi terkait serta masyarakat umum perihal kinerja belanja daerah.

Palembang, Juni 2022

Stella Gracia Immaculata

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penulisan 8
D. Manfaat Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.
A. Landasan Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Konsep yang digunakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Kerangka Pemikiran ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III METODE PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Definisi Konsep ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Fokus Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Jenis dan Sumber Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
E. Informan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
F. Teknik Pengumpulan Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
G. Teknik Keabsahan Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
H. Teknik Analisis Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
I. Sistematika Penulisan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2018-2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan **Error! Bookmark not defined.**
BAB V PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. SARAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA **113**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Belanja Bappeda Sumsel Tahun 2018-2021 5
Tabel 2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2021 6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....27
Tabel 4 Fokus Penelitian 37
Tabel 5 Kriteria Varians Belanja 73
Tabel 6 Rincian Varians Belanja Bappeda Sumsel Tahun 2018-2021.....73
Tabel 7 Kriteria Pertumbuhan Belanja 79
Tabel 8 Realisasi Belanja Tahun 2018-2021.....80
Tabel 9 Pertumbuhan Belanja Bappeda Sumsel.....82
Tabel 10 Belanja operasi Bappeda Prov Sumsel 86
Tabel 11 Belanja Operasi terhadap total belanja tahun 2018 87
Tabel 12 Belanja Operasi terhadap total belanja tahun 2019 87
Tabel 13 Belanja Operasi terhadap total belanja tahun 2020 88
Tabel 14 Belanja Operasi terhadap total belanja tahun 2021 89
Tabel 15 Keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja 89
Tabel 16 Belanja Modal terhadap total belanja tahun 2018 91
Tabel 17 Belanja Modal terhadap total belanja tahun 2019 91
Tabel 18 Belanja Modal terhadap total belanja tahun 2020 92
Tabel 19 Belanja Modal terhadap total belanja tahun 2021 92
Tabel 20 Keserasian Belanja Modal terhadap total belanja 93
Tabel 21 Kriteria Pengukuran Efisiensi 96
Tabel 22 Rasio Efisiensi Belanja.....96
Tabel 23 Matriks Hasil 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 34
Gambar 2 Struktur Organisasi Bappeda Sumsel 71
Gambar 3 Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Sumsel 78
Gambar 4 Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Sumsel 84
Gambar 5 Perbaikan Gedung Bappeda Sumsel 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi.....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 3 SK Skripsi .....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 4 Surat Penelitian Ke Bappeda.....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 5 Surat Kesbangpol .....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 6 Surat Balasan Bappeda .....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 7 Lembar Konsultasi Pembimbing 1.....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 8 Lembar Konsultasi Pembimbing 2.....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 9 Dokumentasi .....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 10 Turnitin .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

UPTB	Unit Pelaksana Teknis Badan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
IKU	Indikator Kinerja
PK	Perjanjian Kinerja
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKBU	Rencana Kebutuhan Barang Unit
RKPBU	Rencana Pemeliharaan Barang Unit
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
KPBU	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KSP	Kebijakan Satu Peta
OMP	*One Map Policy*
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan engendalian Pembangunan
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
BIG	Badan Informasi Geospasial

SDI	*Spatial Data Infrastructure*
GIS	*Geographic Information System*
JIGD	Jaringan Informasi Geospasial Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur bangsa dan negara.Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat demi kesejahteraan bersama. Untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Otonomi daerah menjadi jembatan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa tujuan adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan anggaran sebagai landasan yang dapat membantu mewujudkan kegiatan dan program-program yang telah disusun demi kesejahteraan rakyat.Anggaran tersebut berasal dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) yang sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah daerah dan dimuat dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Anggaran dalam lingkup pemerintah daerah merupakan tulang punggung bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Anggaran dikatakan sangat penting karena anggaran menjadi alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, penyelenggaraan, dan pengendalian organisasi maupun penilaian kinerja.

Kinerja adalah hasil pekerjaan dalam kualitas dan jumlah yang dapat diselesaikan oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya. Istilah lain untuk Kinerja adalah prestasi atau tingkat kemenangan orang atau

sekelompok orang. Kinerja ini akan terlihat dalam suatu organisasi, orang atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran suatu anggaran. Anggaran mengacu pada daftar semua biaya dan pendapatan yang disusun. Selanjutnya yang akan dilihat adalah hasil dari bagaimana anggaran tersebut diselesaikan atau dibelanjakan.

Pertanggungjawaban atau pelaporan atas kinerja belanja tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun harus didukung juga dengan laporan keuangan secara tertulis.Dengan adanya laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, maka laporan tersebut harus disajikan tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membadingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib untuk membuat dan melaporkan kondisi keuangan di daerah.Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Laporan keuangan trediri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenaikegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Mahmudi (2010) menyatakan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

merupakan komponen yang penting dan juga mencerminkan kinerja anggaran yang merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran.Sifat belanja relatif mudah dilakukan. Namun, sangat rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran. Maka dari itu diperlukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah yang memiliki fungsi merencanakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan memiliki anggaran untuk melaksanakan belanja, terdapat 2 jenis belanja yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional berfungsi untuk menopang sarana-prasarana, jasa, dan belanja pegawai guna mendukung kinerja dalam melaksanakan program yang telah dirancang. Belanja Modal direalisasikan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Kebijakan belanja diarahkan agar dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian RPJPD, RPJMD, dan RKPD TA 2020 dimana perencanaan dalam APBD TA 2020 mempedomani hal-hal berikut :

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja dalam rangka peenyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan salah satu pertanggungjawaban dari laporan keuangan per tahunnya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali nya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian

pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD masing-masing.

Berikut ini terdapat tabel mengenai anggaran belanja dan realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 1 Tingkat Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Uraian			
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase
2018	22.049.818.040,00	21.048.756.301,00	1.001.061.739,00	95,46%
2019	32.671.284.000,00	30.175.025.372,00	2.496.258.628,00	92,36%
2020	29.648.407.500,00	26.283.902.702,00	3.364.504.798,00	88,60%
2021	30.506.162.800,00	28.066.209.003,00	2.439.953.797,00	92,03%

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 – 2021 Bappeda Prov. Sumsel (Data Diolah

Dari penelitian awal yang telah penulis lakukan, penulis memperoleh data awal mengenai laporan keuangan akhir tahun untuk periode tahun 2020. Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk masalah-masalah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

1. **Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masih terdapat sisa anggaran dalam jumlah yang cukup besar.**

   Temuan pertama yang menarik penulis untuk meneliti yaitu mengenai realisasi belanja operasi dan belanja modal.Belanja Operasi berfungsi untuk menopang sarana-prasarana, jasa, dan belanja pegawai guna mendukung kinerja dalam melaksanakan program yang telah dirancang. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal

untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pada tabel I menunjukkan bahwa anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari periode tahun anggaran 2018 – 2021 masih terdapat sisa anggaran bahkan di tahun 2020 persentase realisasinya di bawah 90%, terendah dibanding dengan tahun tahun lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.648.407.500,00 dan realisasi belanja sebesar Rp 26.283.902.702,00 atau persentasenya sebesar 88,60%. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja belanja tahun 2018 – 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tingkat realisasi anggaran tahun 2018-2021 yang persentase nya naik turun

Pada tabel berikutnya penulis memberikan data realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal tahun 2018-2021. Penulis ingin membandingkan realisasi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, apakah terjadi perubahan baik dari segi kenaikan atau penurunan anggaran.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Belanja Operasional	Belanja Modal	Persentase
2018	19.674.343.601,00	1.374.412.700,00	95,46%
2019	26.369.680.172,00	3.805.345.200,00	92,36%
2020	24.632.749.642,00	1.651.153.060,00	88,60%
2021	29.465.260.450,00	1.040.902.350,00	92,03%

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 – 2021 Bappeda Prov.Sumsel (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat bahwa untuk tahun 2018 realisasi anggaran belanja operasional sebesar Rp 19.674.343.601,00 dan belanja modal sebesar Rp

1.374.412.700,00 dengan persentase sebesar 95,46%. Untuk tahun 2019 realisasi belanja operasional sebesar Rp 26.369.680.172,00 dan belanja modal sebesar Rp 3.805.345.200,00 dengan persentase 92,36%. Pada tahun 2020 realisasi belanja operasional sebesar Rp 24.632.749.642,00 dan belanja modal sebesar 1.651.153.060,00 dengan persentase sebesar 88,60%. Pada tahun 2021 realisasi belanja operasional sebesar 29.465.260.450,00 dan belanja modal sebesar 1.040.902.350,00 dengan persentase 92,03%. Untuk realisasi belanja operasional dan belanja modal tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan.Walaupun anggaran realisasi untuk belanja operasional dan belanja modal di tahun 2018 merupakan angka yang paling rendah namun, capaian /penggunaan anggaran nya tertinggi. Berdasarkan data tabel di atas tahun 2020 menduduki tingkat realisasi anggaran terendah.

Hasil Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja belanja sudah banyak diteliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2020) yang mengkaji penelitian tentang kinerja belanja pada Rumah Sakit Ernaldi bahar Sumatera Selatan, Asrul (2019) yang mengkaji penelitian tentang belanja daerah di BPKAD kabupaten Selayar, dan Ngkai (2021) yang meneliti tentang belanja daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika NTT. Namun, belum banyak yang meneliti tentang kinerja belanja di Sumatera Selatan. Dia antara semua penelitian terdahulu hanya 1 yang meneliti di Sumatera Selatan. Penggunaan konsep kinerja belanja oleh mahmudi dengan lokus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi pembaharuan penelitian ini. Kinerja belanja dilihat dari anggaran yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan dan program yang termuat dalam laporan keuangan. Anggaran yang telah diberikan kepada instansi daerah sudah wajib untuk digunakan sebaik mungkin sehingga tidak ada anggaran yang tersisa. Anggaran juga seharusnya berkembang dari periode ke periode berikutnya sehingga akan terlihat perubahan. Agar anggaran dapat berkembang diperlukanlah perencanaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu diamati lebih lanjut mengenai kinerja pada belanja operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat dalam judul **"Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 - 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan"**. Dalam rangka mengetahui bagaimana pencapaian kinerja belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu "Bagaimana kinerja belanja di tahun 2018 – 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?"

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas yang menjadi Tujuan dalam penulisan laporan ini yaitu untuk mengetahui kinerja belanja tahun 2018 - 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan mengembangkan ilmu administrasi publik pada konsentrasi keuangan negara dan fiskal, khususnya terhadap kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Manfaat Praktis : Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi instansi publik khususnya instansi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja belanja demi tercapainya otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Effendi, & Singarimbun. (2006). *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: PT. Pustaka LP3.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: STIM YKPN.

Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Makassar: BPFE.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian administrasi.* Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Deviyanti, D. R. (2017). Jurnal Akuntansi. *Analisis Belanja Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016*, 2-16.

Fatmahwati, S. (2021). Kinerja Belanja Daerah. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPPKAD Kota Surakarta*, 1-5.

Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). Jurnal ECOBUSS. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo*, 26-35.

Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2014). Jurnal Akuntansi. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, 2-13.

Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Jurnal EMBA. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 1473-1484.

Meyasha, I., Fhatimah, P., & Soleiman, E. C. (2020). Jurnal Manajemen. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon*, 9-15.

Ramadani, R. F., & Suyatin, E. A. (2016). Jurnal Akuntansi. *Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda*, 2-15.

Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Jurnal Of Economic Management and Accounting. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Riau*, 49-58.

Riska. (2020). Analisis Kinerja Belanja. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*, 1-39.

Sinambela, E. (2016). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Analisis Kinerja Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*, 1-17.

Wirawan, S. (2019). Jurnal Riset Akuntansi Aksioma. *Analisis Belanja Daerah*, 63-78.

SKRIPSI

Mulyani, S. (2020). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Riska. (2020). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.* Makassar: Universitas Muhammadiyah.

Rusdi. (2018). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.* Makassar: Universitas Muhammadiyah .

Sartika, D. (2018). *Analisis Kinerja Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.* Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri.

Wiranda, D. G. (2021). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Periode 2016-2020.* Batu Sangkar: Institut Agama Islam Negeri.

Asrul, M. P. (2019). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.* Kepulauan Selayar: STIE Nobel Makassar.

Mustoffa, A. F. (2019). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Po.* Ponorogo: Universitas pamulang.

Ngkai, K. K. (2021). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Nusa Tenggara Timur.* Nusa Tenggara Timur: Universitas Nusa Cendana.

Sastri, P. I. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.* Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ulfa, S. M. (2018). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan.* Medan: UIN Suska Riau.

DOKUMEN

Laporan Akhir Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Akhir Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PERATURAN UNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga/Negara

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan